

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pertumbuhan Ekonomi

a. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi atau disebut juga PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi (Badan Pusat Statistik). Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil. Pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah dapat diukur dengan cara membandingkan PDRB tahun yang sedang berjalan dengan PDRB tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi bertambah dan kesejahteraan penduduk meningkat (Sukirno, 2000).

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator yang dapat dijadikan acuan guna menganalisis pembangunan ekonomi pada suatu Negara. “pertumbuhan’ (growth) tidak identik dengan “pembangunan” (development). Pertumbuhan ekonomi hanya salah satu syarat dari banyak syarat yang diperlukan dalam proses pembangunan (Meier, 1995). Pertumbuhan ekonomi hanya mencatat peningkatan produksi barang dan jasa secara nasional, sedangkan pembangunan

mencakup lingkup yang lebih luas. Pembangunan ekonomi adalah kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan perekonomian dan taraf hidup masyarakatnya, atau suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk meningkat dalam jangka panjang. Pembangunan ekonomi meliputi peningkatan pendapatan perkapita masyarakat. Salah satu sasaran pembangunan ekonomi daerah adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan PDRB akan memperlihatkan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Penekanan pada “proses”, karena mengandung unsur dinamis, perubahan atau perkembangan. Oleh sebab itu, pemahaman indikator pertumbuhan ekonomi akan dilihat dalam kurun waktu tertentu, misalnya tahunan. Aspek tersebut relevan untuk dianalisa sehingga kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerinrah untuk mendorong aktivitas perekonomian dapat dinilai efektivitasnya.

b. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Didalam ilmu ekonomi terdapat beberapa teori yang mendefinisikan pertumbuhan. Namun dalam perkembangannya banyak ilmuan yang mampu membuat teori-teori baru yang disesuaikan pada zamannya dengan melihat fenomena-fenomena yang menjadi pertimbangan ilmuan tersebut. Sedangkan faktor lain yang menyebabkan ada lebih dari satu teori adalah perbedaan cara pandang para ekonom dalam membahas suatu fenomena sehingga terjadi perbedaan teori sebagai konsekuensi dari perbedaan cara pandang tersebut.

Adapun beberapa teori dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu :

1) Teori Klasik Adam Smith

Adam Smith merupakan tokoh ekonom klasik yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu : luas tanah, jumlah penduduk, jumlah barang dan modal serta teknologi yang digunakan. Secara garis besar teori pembangunan kaum klasik menurut Sukirno (2006:247), adalah sebagai berikut :

- a) Tingkat perkembangan suatu masyarakat tergantung kepada empat faktor yaitu 4 faktor yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan tingkat teknologi yang dicapai.
- b) Pendapatan nasional suatu masyarakat dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu : upah para tenaga kerja, keuntungan para pengusaha dan sewa tanah yang diterima pemilik tanah.
- c) Kenaikan upah akan menyebabkan pertumbuhan penduduk.
- d) Tingkat keuntungan merupakan faktor yang menentukan besarnya pembentukan modal, apabila tidak ada keuntungan maka pembentukan modal tidak akan terjadi dan perekonomian akan mencapai tingkat *stationary state*.
- e) Apabila semakin berkurang segala kegiatan ekonomi dapat disebabkan, tidak adanya kemajuan teknologi, kemudian penambahan penduduk akan menurunkan tingkat upah, tingkat keuntungan berkurang, akan tetapi sewa tanah naik.

2) Teori Neo Klasik Sollow

Teori ini dikembangkan oleh Abramovits dan Robert Sollow yang melihat dari sudut pandang penawaran. Pertumbuhan ekonomi tergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi seperti modal, tenaga kerja dan teknologi. Sollow mengemukakan bahwa faktor terpenting yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi bukanlah penambahan modal dan tenaga kerja. Faktor yang paling penting adalah kemajuan teknologi dan kemahiran dan kepakaran tenaga kerja (Sukirno, 2013). Kemahiran dan kepakaran tenaga kerja ini yang dapat disebut sebagai kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Sehingga agar pertumbuhan ekonomi terwujud, pemerintah juga harus mengembangkan kualitas SDM masyarakatnya.

3) Teori Ekonomi Modern

Kuznet, Rostow dan Teori Harrod-Domar adalah ekonom yang mewakili teori pertumbuhan ekonomi modern. Rostow mengemukakan dalam (Suryana, 2000) pembangunan ekonomi adalah perubahan yang terjadi pada masyarakat yang dapat diketahui dari berpindahnya model tradisional ke model modern dengan melalui tahapan;

- a) Masyarakat Tradisional (*The Traditional Society*)
- b) Prasyarat lepas landas (*The Precondition for Take-off*)
- c) Lepas landas (*The Take-off*)
- d) Tahap Kematangan (*The Drive to Maturity*)
- e) Masyarakat berkonsumsi tinggi (*The age of high mass consumption*)

Kuznet mendefinisikan bahwa pertumbuhan ekonomi sebagai kemampuan jangka panjang untuk mengadakan bermacam-macam barang yang terus meningkat kepada masyarakat, kemampuan tersebut diperoleh atas dukungan institusional, penguasaan teknologi dan juga ideologis yang diperlukan. (Suryana, 2000).

4) Teori Pertumbuhan Endogen

Kata kunci dari teori pertumbuhan endogen ini adalah ketiadaan diminishing return dan capital. Formula sederhana dari teori ini adalah $Y = AK$, dimana dijelaskan bahwa A adalah tingkat teknologi yang memiliki nilai positif. Gagasan dari ketiadaan diminishing return menjadi kondisi realistic, namun akan menjadi mungkin jika K merupakan modal yang mencakup human capital. Apabila output perkapita diformulasikan sebagai $y = Ak$, dan rata-rata produk marginal yang bersumber dari Kapital yakni konstan pada tingkat $A > 0$.

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Definisi dari PDRB adalah total nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam satu daerah tertentu, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang diperoleh dari seluruh unit ekonomi di suatu daerah. PDRB atas harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu waktu tertentu sebagai harga dasar (Widodo, 2006).

PDRB merupakan hasil penjumlahan dari semua barang dan jasa akhir atau semua nilai tambah yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam periode waktu tertentu (1 tahun). Untuk menghitung nilai seluruh produksi yang dihasilkan suatu daerah dalam suatu periode tertentu dapat digunakan 3 cara penghitungan, yaitu : (Widodo, 2006)

1. Cara Produksi

Dengan cara ini pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai produksi barang dan jasa yang diwujudkan oleh berbagai sektor lapangan usaha pada suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (1 tahun).

2. Cara Pengeluaran

Menurut cara ini pendapatan nasional adalah jumlah nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok, dan ekspor netto (ekspor dikurangi impor).

3. Cara Pendapatan

Dalam penghitungan ini pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk mewujudkan pendapatan nasional.

Data pendapatan regional merupakan salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian regional setiap tahun. Manfaat yang didapat jika mengetahui data PDRB adalah sebagai berikut :

1) PDRB atas dasar Harga Berlaku/Nominal

- a. Mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah provinsi/kabupaten. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar pula.
- b. Mengetahui pendapatan yang memungkinkan dapat dinikmati oleh penduduk suatu wilayah/provinsi.

2) PDRB atas dasar harga konstan

- a. Mengetahui laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor ekonomi dari tahun ke tahun.
- b. Mengetahui laju pertumbuhan konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri, perdagangan antar pulau atau antar provinsi.

Dari paparan PDRB diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa PDRB merupakan jumlah keseluruhan nilai dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat atau warga dalam suatu wilayah/daerah dalam kurun waktu tertentu (1 tahun). PDRB juga sebagai acuan untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Jadi besarnya nilai tambah pendapatan suatu daerah merupakan PDRB yang diperoleh dari semua unit produksi dalam jangka waktu tertentu.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Undang-undang nomer 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Semua penerimaan

yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran bersangkutan harus dicatat dalam APBD.

Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas menjalankan mandat dari rakyat membutuhkan biaya yang besar. Untuk pembiayaan tersebut pemerintah daerah mempunyai beberapa sumber penerimaan daerah yang dituangkan dalam anggaran. Anggaran yang dibuat akan mencerminkan politik pengeluaran pemerintah yang rasional baik secara kuantitatif maupun kualitatif sehingga akan terlihat (Mardiasmo, 2003):

- a) Adanya pertanggungjawaban pemungutan pajak dan pungutan lain-lain oleh pemerintah misalnya untuk memperlancar ekonomi.
- b) Adanya hubungan yang erat antara fasilitas penggunaan dana dan penarikannya.
- c) Adanya pola pengeluaran pemerintah yang dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam menentukan pola tingkat distribusi penghasilan dalam ekonomi.

Dibawah ini ditunjukkan beberapa pengertian APBD, antara lain:

- a) Pengertian APBD menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pusat dan pemerintah daerah adalah “Rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah”.
- b) Pengertian APBD menurut Mamesah (1995: 20) pada orde baru adalah “Rencana operasional Keuangan Pemerintah Daerah, dimana disatu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-setingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan

dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan dipihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud”.

Definisi menurut Mamesah (1995) APBD mengandung unsur:

- 1) Rencana operasional daerah, yang menggambarkan adanya aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dimana aktivitas tersebut telah diuraikan secara rinci.
 - 2) Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya yang ada merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan.
 - 3) Dituangkan dalam bentuk angka, jenis kegiatan, dan jenis proyek.
 - 4) Untuk keperluan satu tahun anggaran yaitu April sampai dengan Maret dan Januari sampai dengan Desember.
- c) Pengertian APBD menurut Halim (2002: 24) adalah

“Rencana kegiatan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan biaya yang merupakan batas maksimal untuk suatu periode anggaran”.

Karakteristik APBD menurut Abdul Halim (2002: 17), antara lain:

- a) APBD disusun oleh DPRD bersama-sama Kepala Daerah.
- b) Pendekatan yang dipakai dalam penyusunan anggaran adalah pendekatan tradisional (line item) yaitu anggaran disusun berdasarkan jenis penerimaan dan jenis pengeluaran. Oleh karena itu, setiap baris dalam APBD menunjukkan tiap jenis penerimaan dan pengeluaran. penggunaan pendekatan ini bertujuan

untuk melakukan pengendalian atas pengeluaran. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling tradisional (tertua) diantara berbagai pendekatan penyusunan anggaran.

- c) Siklus APBD terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan, penyusunan, dan penetapan perhitungan APBD. Penyusunan dan perhitungan APBD merupakan pertanggungjawaban APBD. Pertanggungjawaban itu dilakukan dengan menyampaikan perhitungan APBD kepada Menteri Dalam Negeri untuk Pemerintahan Daerah Tingkat I dan kepada Gubernur untuk Pemerintahan Daerah Tingkat II. Oleh karena itu, pertanggungjawaban bersifat vertikal.
- d) Dalam tahap pengawasan dan pemeriksaan dan tahap penyusunan dan penentuan perhitungan APBD, pengendalian dan pemeriksaan/ audit bersifat keuangan. Hal ini tampak pada pengawasan pendapatan daerah dan pengawasan pengeluaran daerah.
- e) Pengawasan terhadap pengeluaran daerah dilakukan berdasarkan 3 unsur utama, yaitu unsur ketaatan pada peraturan perundangan yang berlaku, unsur kehematan dan efisiensi, dan unsur hasil program (untuk proyek-proyek daerah).
- f) Sistem akuntansi keuangan daerah menggunakan tata buku anggaran yaitu anggaran dan pembukuan saling berhubungan dan saling mempengaruhi.

4. Fungsi APBD

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 3 ayat 4 UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Fungsi APBD adalah sebagai berikut:

a. Fungsi Otorisasi

Anggaran daerah merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan

b. Fungsi Perencanaan

Anggaran daerah merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan

c. Fungsi Pengawasan

Anggaran daerah menjadi pedoman untuk meneliti apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

d. Fungsi Alokasi

Anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumberdaya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian

e. Fungsi Distribusi

Anggaran daerah harus mengandung arti/memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan

f. Fungsi Stabilisasi

Anggaran daerah harus mengandung arti/harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian

5. Keuangan Daerah

Dalam keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006, menyebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah

dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang harus dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-Undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Keuangan daerah merupakan bagian *integral* dari keuangan negara dalam pengalokasian sumber-sumber ekonomi, pemertaan hasil-hasil pembangunan dan menciptakan stabilitas ekonomi guna stabilitas politik. Peranan keuangan daerah menjadi semakin penting karena adanya keterbatasan dana yang dapat dialihkan ke daerah berupa subsidi dan bantuan. Halim (2008), keuangan daerah yaitu semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum/ dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

6. Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis (*strategic planning*) suatu organisasi umum, kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu (Bastian, 2005). Jika pencapaian melebihi daripada yang direncanakan maka dapat dikatakan kinerja

tersebut sangat bagus. Namun apabila pencapaian tidak sesuai atau kurang dari yang telah direncanakan, maka kinerjanya buruk.

Kinerja Keuangan Daerah adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan daerah. Kinerja keuangan merupakan prestasi yang dapat dicapai pada anggaran yang telah dibuat dengan menganalisis perbedaan antara realisasi dengan target yang dianggarkan, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, sehingga nantinya dapat dihasilkan tingkat efektivitas dan efisiensi tertentu sesuai dengan kriteria penilaian kinerja keuangan yang telah ditetapkan (Artanti, 2010).

Dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Daerah adalah tingkat perolehan hasil kerja pemerintah daerah di bidang keuangan dalam periode tertentu (1 tahun) yang diukur dengan kriteria indikator rasio keuangan. Berikut ini merupakan rasio keuangan daerah yang dijadikan sebagai variabel dalam penelitian ini :

a. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. “Pendapatan Asli daerah (PAD) efektif apabila rasio yang dicapai mencapai 100 atau lebih dari 100 %. Dengan demikian semakin besar rasio efektivitas maka kinerja pemerintahan pun semakin baik” (Halim, 2008: 234).

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Kinerja keuangan berdasarkan nilai efektivitas yang diperoleh dari rumus diatas menurut Mohamad Mahsun (2006:187) seperti pada tabel berikut :

Tabel 2. 1
Pedoman Penilaian Dan Kinerja Efektifitas terhadap PAD

Persentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
100 – ke atas	Sangat Efektif
90 – 100	Efektif
80 – 90	Cukup Efektif
60 – 80	Kurang Efektif
Dibawah 60	Tidak Efektif

Sumber : Mohamad Mahsun (2006)

b. Rasio Efisiensi

Analisis tingkat efisiensi keuangan daerah dapat dihitung dengan menggunakan rasio efisiensi, yaitu rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Menurut Halim (2008:234) rasio efisiensi dapat diukur dengan:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2. 2
Pedoman Penilaian dan Kinerja Efisiensi Keuangan

Persentase Efisiensi (%)	Kriteria
100% keatas	Tidak Efisien
100%	Efisien Berimbang
Kurang dari 100%	Efisien

Sumber : Mohamad Mahsun (2011)

Apabila rasio efisiensinya kurang dari 100% maka dapat dikriteriakan sudah efisien. Sebaliknya jika melebihi 100% dapat dikriteriakan tidak efisien, artinya masih ada pemborosan dalam belanja daerah.

c. Rasio Kemandirian

Menurut Widodo (Halim 2008:234) kemandirian keuangan daerah atau ekonomi fiskal menunjukkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan penerimaan daerah. Tingkat kemandirian menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama dalam pendapatan asli daerah. Menurut Mahsun dalam Suyana Utama (2008:33) Rasio kemandirian diukur dengan:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan Ketergantungan daerah terhadap Pendapatan Transfer (sumber data ekstern). Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama

Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 3
Pedoman penilaian kemandirian keuangan daerah

Kemampuan Daerah	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	25 – 50	Konsultatif
Sedang	50 – 75	Partisipatif
Tinggi	75 – 100	Delegatif

Sumber : Suyana Utama (2008)

- 1) Pola hubungan instruktif, adalah peranan pemerintah pusat yang lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (termasuk daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah)
- 2) Pola hubungan konsultatif, merupakan sudah mulai berkurangnya campur tangan pemerintah pusat karena pemerintah daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- 3) Pola hubungan partisipatif, yaitu tingkat peranan pemerintah pusat lebih berkurang daripada kemampuan konsultatif, mengingat daerah sudah mampu mendekati melaksanakan otonomi daerah.
- 4) Pola hubungan delegatif, dalam pola hubungan ini peranan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah dianggap telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.

d. Rasio Belanja Operasi

Rasio Belanja Operasi merupakan perbandingan antara total Belanja Operasi dengan Total Belanja Daerah. Rasio ini menunjukkan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk Belanja Operasi. Belanja Operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Pada umumnya proporsi Belanja Operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90%. Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah (Mahmudi 2010:164). Rasio belanja operasi dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

e. Rasio Belanja Modal

Rasio Belanja Modal menunjukkan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin. Pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah adalah antara 5-20% (Mahmudi 2010:164). Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

7. Hubungan Antar Variabel

a. Hubungan antara Rasio Efektivitas terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Rasio Efektivitas merupakan gambaran kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin banyak nilai presentase rasio efektivitas yang diperoleh maka semakin efektif dalam mengelola Pendapatan Asli Daerahnya kemudian akan berdampak positif juga terhadap pertumbuhan ekonomi.

b. Hubungan antara Rasio Efisiensi terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Rasio Efisiensi menunjukkan besarnya Total Realisasi Belanja Daerah dibandingkan Anggaran Belanja Daerah yang telah direncanakan oleh pemerintah. Semakin kecil perbandingan antara dana yang dibelanjakan dengan anggaran maka semakin efisien. Artinya pemerintah daerah tidak menghabiskan dana anggarannya dan dapat digunakan untuk keperluan lainnya selanjutnya akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

c. Hubungan Rasio Kemandirian terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Rasio Kemandirian menunjukkan perbandingan antara PAD dengan Total pendapatan Transfer atau bantuan dari pemerintah pusat yang sering disebut dengan derajat desentralisasi fiskal. Semakin tinggi presentase rasio kemandirian yang diperoleh maka dapat dikatakan semakin mandiri daerah tersebut. Artinya perekonomian sudah cukup bagus karena sudah mempunyai PAD yang mencukupi yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi dan berdampak positif.

d. Hubungan Rasio Belanja Operasional dengan Pertumbuhan Ekonomi

Rasio Belanja Operasional menggambarkan perbandingan Belanja Operasional dengan Total Belanja Daerah yang telah dibelanjakan. Belanja operasi seperti Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dsb. Semakin tinggi belanja maka daerah semakin banyak mempunyai barang dan jasa. Artinya pemerintah semakin tinggi peluangnya dalam menambah jumlah PDRB yang dapat menstabilkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak positif.

e. Hubungan Antara Rasio Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi

Rasio Belanja Modal merupakan perbandingan antara Total Belanja Modal dibandingkan Total Belanja Daerah. Belanja modal yaitu belanja infrastruktur seperti Belanja tanah, Belanja Peralatan dan mesin, Belanja Aset tetap, dsb. Semakin baik infrastrukturnya di suatu daerah maka akan semakin baik juga perekonomian karena di dukung oleh fasilitas yang memadai. Jadi belanja modal seharusnya berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian Wuku Astuti (2015), menganalisis “Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Pengangguran Dan Kemiskinan yang dilakukan pada kabupaten Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Periode 2007-2011”. Penelitian ini untuk menguji pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran dan kemiskinan. Sampel yang digunakan sebanyak 73 kabupaten dipilih dari populasi seluruh kabupaten/kota di pulau jawa, dengan menggunakan

metode purposive sampling. Teknik analisis menggunakan regresi berganda untuk menguji hubungan antara variabel terikat dengan variabel tergantung, setelah sebelumnya semua data memenuhi berbagai persyaratan asumsi yang relevan. Hasil tes menunjukkan bahwa rasio kemandirian dan rasio efektivitas berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi, sedangkan rasio efisiensi tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil pengujian pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran dan kemiskinan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki efek negatif yang signifikan terhadap pengangguran, namun tidak signifikan terhadap kemiskinan.

Kartika Berliani (2016), Meneliti dengan judul “Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Majalengka”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan verifikatif dan bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Majalengka tahun 2007 s.d. 2014 baik secara simultan maupun secara parsial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang diukur dengan rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi dan keserasian belanja daerah dengan menggunakan analisis deskriptif, bahwa tingkat kemandirian mempunyai nilai rata-rata sebesar 7,15%. Tingkat efektivitas mempunyai nilai rata-rata sebesar 100,41%. tingkat efisiensi mempunyai nilai rata-rata sebesar 95,45%. Tingkat keserasian mempunyai nilai rata-rata sebesar 38,28%. Untuk pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan analisis deskriptif dalam jangka waktu 8 tahun

dari tahun 2007-2014 mempunyai nilai rata-rata 70,62%. Hasil pengolahan data menggunakan metode verifikatif bahwa kinerja keuangan berpengaruh positif secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi, kinerja keuangan berpengaruh secara simultan dan berpengaruh positif secara parsial terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Kinerja keuangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan memberikan dampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Majalengka.

Kurni Adi Suwandi, Afrizal Tahar (2015), Meneliti dengan judul “Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening studi kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota D.I. Yogyakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk untuk menguji secara empiris pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan rasio derajat desentralisasi fiskal, ketergantungan fiskal, kemandirian finansial, efektivitas pendapatan asli daerah (PAD), dan tingkat kontribusi BUMD terhadap belanja modal alokasi rasio. Populasi penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta tahun 2003-2012. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio derajat desentralisasi fiskal dan ketergantungan fiskal memiliki pengaruh negatif pada alokasi belanja modal, rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD) memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja modal daerah tidak memiliki efek memediasi atas hubungan rasio derajat desentralisasi fiskal, efektivitas pendapatan asli daerah (PAD), dan tingkat kontribusi BUMD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Namun alokasi belanja modal dapat memediasi hubungan antara ketergantungan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

Syarifah Aisza Faradiba Alfi, Ida Nuraini (2018), meneliti tentang “Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengelolaan keuangan daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2012-2016. Variabel penelitian yang digunakan adalah (1) rasio kemandirian keuangan daerah, (2) rasio efektifitas PAD dan (3) belanja modal. Populasi dalam penelitian ini adalah 13 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan dan sampel diambil dengan metode purposive sampling. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berdasarkan, hasil uji regresi linier berganda diketahui kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), efektifitas PAD berpengaruh positif signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Hilmi Risyanto (2015) membuat penelitian “Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dan Kemandirian Keuangan Daerah Serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2004-2013”. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui tingkat perkembangan

kemampuan dan kemandirian keuangan daerah serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Garut tahun 2004-2013. Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Garut. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data keuangan APBD dan PDRB per kapita di Kabupaten Garut tahun anggaran 2004-2013. Metode analisis data pada penelitian ini ada 2 macam, yang pertama adalah rasio kemampuan keuangan daerah dan rasio kemandirian keuangan daerah. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan alat analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut : rasio kemampuan keuangan daerah memiliki rata-rata 6,54 % yang tergolong rendah, sedangkan kemandirian keuangan daerah ditunjukkan dengan angka rasio rata-ratanya adalah 6,39% masih berada diantara 0% - 25% tergolong mempunyai pola hubungan instruktif. Kemampuan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi (growth), artinya semakin tinggi tingkat kemampuan keuangan daerah semakin tinggi juga tingkat pertumbuhan ekonomi. Kemandirian Daerah berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan, artinya semakin tinggi rasio kemandirian daerahnya tidak akan mengurangi tingkat pertumbuhan ekonomi. Ini berarti bahwa tingkat kemampuan keuangan Kabupaten Garut masih rendah dalam melaksanakan otonominya yang berarti kemampuan Pemerintah Kabupaten Garut dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Sosial masyarakat masih relatif rendah meskipun dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan penurunan.

Minh Ngoc Phan (2008) Meneliti dengan judul “*The roles of capital and technological progress in Vietnam's economic growth*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur kontribusi pembentukan modal, tenaga kerja, dan kemajuan teknologi untuk pertumbuhan ekonomi Vietnam, dampak reformasi ekonomi (*doi moi*) sejak akhir tahun 1986, dan tingkat pengembalian ke modal dan tenaga kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: kemajuan teknologi secara statistik tidak ada dalam pertumbuhan ekonomi Vietnam selama periode yang diteliti dan sumber pertumbuhan ekonomi yang paling penting adalah akumulasi modal, yang menyumbang antara 84 persen dan 89 persen pertumbuhan ekonomi Vietnam selama periode 1975-2005, dan antara 85 persen dan 90 persen pada periode reformasi (1986–2005). Jurnal ini adalah yang pertama dari jenisnya dalam literatur Vietnam yang berhasil menyoroti, antara lain, peran modal dan kemajuan teknologi dalam ekonomi Vietnam selama periode 1975-2005. Ini juga memperjelas bahwa pertumbuhan ekonomi Vietnam sebagian besar didorong oleh dana asing dan, dengan demikian, kebergantungan yang kuat pada ekonomi pada sumber keuangan ini akan membuat pertumbuhannya tidak berkelanjutan. Untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan dalam beberapa dekade mendatang, Vietnam harus bergeser untuk lebih mengandalkan pertumbuhan produktivitas, yang sejauh ini tidak ada, dan lebih sedikit pada akumulasi pertumbuhan faktor.

Gabriel Chukwu Nkechukwu, Johnson Ifeanyi Okoh (2015) Meneliti dengan judul “*Capital Expenditure at Disaggregated level and Economic Growth in Nigeria: An Empirical Analysis*”. Tujuan utama dari makalah ini adalah untuk

menguji efek parsial dan bersama dari pengeluaran modal terpilah pada ekonomi pertumbuhan di Nigeria. Studi ini dipersepsikan tentang efek kausal antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Cakupan data timeseries tahunan 1981-2013 untuk belanja modal untuk pendidikan, kesehatan, pertanian dan pembangunan jalan dianalisis menggunakan model regresi berganda paling sederhana untuk memprediksi pertumbuhan ekonomi. Data diperoleh dari Bank Sentral Nigeria Buletin Statistik. Kointegrasi dan VECM diterapkan dalam memperkirakan data untuk menguji efek jangka panjang dan jangka pendek dari variabel pada pertumbuhan ekonomi. Tes kausalitas Granger dilakukan untuk memastikan sebab-akibat dari variabel. Hasilnya menunjukkan ada hubungan positif jangka panjang antara pertumbuhan ekonomi dan belanja modal untuk pendidikan dan jalan; sementara ada hubungan negatif jangka panjang antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran modal untuk pertanian dan kesehatan. Hasil juga menunjukkan ada efek kausal searah mulai dari pertumbuhan ekonomi hingga pengeluaran modal untuk pertanian dan pembangunan jalan; saat disaat yang sama efek kausal searah membentang dari pengeluaran modal untuk pendidikan dan kesehatan hingga pertumbuhan ekonomi. R^2 yang disesuaikan adalah 33% menunjukkan bahwa proporsi yang lebih besar dari masalah dalam pertumbuhan ekonomi tidak dijelaskan oleh pengeluaran modal di Nigeria. Rekomendasi adalah bahwa pemerintah harus meninjau mekanisme pemantauannya untuk memastikan pengelolaan dana yang memadai dan bijaksana.

Niloy Bose, M. Emranul Haque, Denise R. Osborn (2007) Meneliti dengan judul "*Public Expenditure And Economic Growth: A Disaggregated Analysis For Developing Countries*". Dalam Penelitian ini, mereka menguji efek pertumbuhan pengeluaran pemerintah untuk panel 30 negara berkembang selama tahun 1970-an dan 1980-an, dengan fokus khusus pada pengeluaran pemerintah terpilah. Metodologi mereka meningkat pada penelitian sebelumnya tentang topik ini dengan secara eksplisit mengakui peran kendala anggaran pemerintah dan kemungkinan bias yang timbul dari variabel yang dihilangkan. Hasil utama penelitian mereka ada dua. Pertama, pangsa pengeluaran modal pemerintah dalam PDB positif dan berkorelasi signifikan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi pengeluaran saat ini tidak signifikan. Kedua, pada tingkat terpilah, investasi pemerintah dalam pendidikan dan total pengeluaran dalam pendidikan adalah satu-satunya pengeluaran yang secara signifikan terkait dengan pertumbuhan begitu kendala anggaran dan variabel yang dihilangkan dipertimbangkan.

Sonni Yulindra (2012) Meneliti dengan judul "*The Effect of Fiscal Decentralization on Local Economic Growth in Sumatera Barat Province*". Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh implementasi desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi lokal di Provinsi Sumatera Barat. Sampel data penampang yang mencakup 15 kota dan kabupaten di Sumatera Barat selama sepuluh tahun (periode 2001-2010) digunakan untuk menguji apakah desentralisasi fiskal berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara positif dan signifikan. Hasil dari estimasi data panel menghasilkan bukti bahwa ada hubungan positif antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi

lokal di Sumatera Barat. Temuan menunjukkan bahwa peningkatan perubahan derajat desentralisasi fiskal akan berkontribusi untuk merangsang pertumbuhan ekonomi lokal. Analisis lebih lanjut juga menegaskan bahwa variabel lain yang dianggap sebagai penentu pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi lokal secara signifikan. Secara umum, desentralisasi fiskal dianggap memainkan peran penting untuk meningkatkan pembangunan ekonomi. Ini karena ada devolusi kekuatan fiskal dari pemerintahan tingkat tinggi ke pemerintahan tingkat bawah. Ini dapat menyediakan layanan dan infrastruktur publik secara efisien. Ada beberapa bukti yang menunjukkan desentralisasi fiskal mempengaruhi pertumbuhan secara positif. Namun, klaim ini tidak dapat digeneralisasi untuk semua negara atau wilayah.

Dihan Lucky (2013) Menganalisis tentang “*Analysis Of The Effect Of Regional Financial Performance To Economic Growth and Poverty Through Capital Expenditure*”. Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan secara empiris pengaruh kinerja keuangan yang diukur dari rasio biaya terhadap pendapatan, upaya fiskal, kemampuan pembiayaan, dan tingkat derajat desentralisasi fiskal terhadap sejumlah variabel, yaitu: (1) belanja modal, (2) pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, (3) pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan melalui belanja modal, dan (4) kemiskinan melalui belanja modal dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis jalur. Sampel penelitian ini adalah 38 kabupaten / kota di Provinsi Jawa Timur selama 7 tahun terakhir (2005-2011). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang diukur dari kapabilitas pembiayaan menunjukkan pengaruh langsung yang

tidak signifikan terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi sedangkan pengaruh terhadap kemiskinan menunjukkan pengaruh signifikan positif. Selanjutnya, dari efek kinerja keuangan tidak langsung melalui belanja modal, ada variabel pengeluaran untuk rasio pendapatan, upaya fiskal, dan tingkat variabel desentralisasi fiskal yang memiliki efek tidak langsung yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (dengan cara positif) dan kemiskinan (dalam cara negatif) sedangkan untuk efek kinerja keuangan melalui pengeluaran modal dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan memiliki pengaruh tidak langsung dan negatif yang signifikan, terutama yang diukur menggunakan rasio pengeluaran terhadap pendapatan, upaya fiskal, dan tingkat desentralisasi fiskal. Akhirnya, untuk meningkatkan kinerja keuangan khususnya perlu mengoptimalkan kemampuan pendanaan baik dalam hal pendapatan dan pengeluaran, dalam hal optimalisasi pendapatan PAD, Silpa, dan pinjaman, sementara pengoptimal pengeluaran perlu melakukan tinjauan pengeluaran yang sudah selesai.

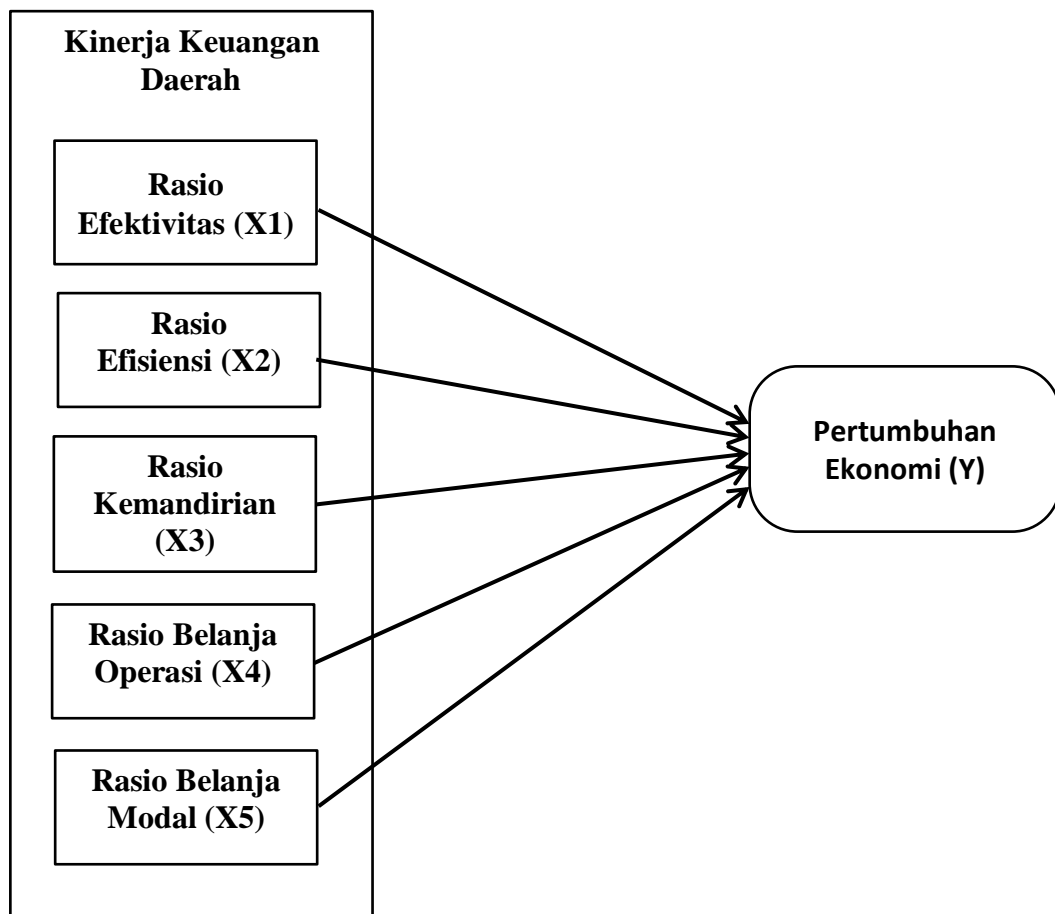
C. Hipotesis

Adapun yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah diduga memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.
2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah diduga memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.
3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah diduga memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.
4. Rasio Belanja Operasional diduga memiliki hubungan positif dan berpengaruh terhadap signifikan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.
5. Rasio Belanja Modal diduga memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

D. Model Penelitian

Variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan Rasio Keuangan Daerah antara lain Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian, Rasio Belanja Operasional, Rasio Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi maka dapat digambarkan kerangka pemikiran seperti diberikut ini:



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran